Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 21354-21358

Peran Kepemimpinan Adat Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Tanjung Koto Kampar Hulu

Lili Suryani[1] , Sujianto[2] , Nurmala Sari[3] , Lilis Wahyuni[4] , Latip5
[1345] Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Indonesia
[2] Universitas Riau
Corresponding Author: Lili Suryani, e-mail: Lilisuryani@stia-lk-dumai.ac.id

Published: August, 2025

ABSTRACT
This study aims to analyze the role of traditional leadership in village governance in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Riau. Tanjung Village is an indigenous village that upholds the principle of Tali Bapilin Tigo as a foundation of unity between customary law, religion, and government. The study employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation. The results reveal that traditional leadership plays a crucial role in conflict resolution, decision-making, and strengthening the legitimacy of village governance. Although village governance is conducted democratically, the presence of traditional leaders from the four clans (Bomo, Melayu, Piliang, and Pitopang) remains a primary reference in social and political life. A comparison with other indigenous villages in Indonesia shows that Tenganan Village (Bali) is dominated by customary law, Minangkabau Nagari emphasizes the integration of customary law and Islam, while Tanjung Village represents an integration of customary law, religion, and government. This study highlights that traditional leadership can synergize with formal democracy, though challenges remain in administrative governance and village economic development

Keywords: *Traditional Leadership, Village Governance, Local Wisdom, Tali Bapilin Tigo*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Kepemimpinan adat di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak masa pra-kolonial, pemimpin adat telah menjadi figur sentral dalam menjaga keteraturan sosial, mengatur norma kehidupan bersama, dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Peran ini meluas hingga ke ranah ekonomi, politik lokal, dan spiritual, sehingga membentuk identitas serta sistem nilai masyarakat yang khas di setiap wilayah (Koentjaraningrat, 2009). Dengan demikian, kepemimpinan adat bukan hanya struktur sosial, melainkan juga instrumen penting dalam mempertahankan kohesi sosial serta keberlangsungan budaya masyarakat pedesaan.

Pasca reformasi, semangat desentralisasi memperkuat kembali peran adat dalam tata kelola pemerintahan desa. Melalui pengakuan otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya dalam UU Nomor 3 Tahun 2024, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul maupun adat istiadat setempat (Latip et al., 2023). Regulasi ini menegaskan bahwa desa bukan sekadar unit administratif negara, tetapi juga kesatuan masyarakat hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal.

Namun demikian, hubungan antara kepemimpinan adat dan pemerintahan desa modern tidak selalu berjalan harmonis. Di beberapa wilayah, kepemimpinan adat dianggap bersaing dengan kepemimpinan formal, sementara di wilayah lain justru terjalin sinergi yang memperkuat tata kelola

desa (Henley & Davidson, 2007). Kompleksitas ini menimbulkan variasi pola hubungan antara tradisi dan modernitas dalam pemerintahan desa di Indonesia. Dengan kata lain, peran kepemimpinan adat dalam tata kelola desa tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, politik, dan kultural masing-masing daerah.

Kepemimpinan adat memiliki potensi strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif dan partisipatif. Kolaborasi antara pemimpin adat dan kepala desa, misalnya, dapat meningkatkan legitimasi keputusan, memperkuat kapasitas kelembagaan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Subagyo et al., 2021). Namun, potensi ini sering kali belum dioptimalkan karena keterbatasan regulasi, kurangnya ruang dialog, atau dominasi kepentingan politik tertentu.

Salah satu contoh menarik dapat dilihat di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Riau, yang masih memegang teguh prinsip Tali Bapilin Tigo—kebersatuan antara adat, agama, dan pemerintah. Desa ini dihuni oleh empat suku utama: Bomo, Melayu, Piliang, dan Pitopang, yang masing-masing dipimpin oleh kepala suku dengan peran strategis dalam pengambilan keputusan adat, penyelesaian konflik, dan menjaga kohesi sosial (Putra et al., 2020). Uniknya, meskipun kepala desa dipilih secara demokratis sesuai aturan nasional, legitimasi kepemimpinannya tidak akan kuat tanpa dukungan para pemimpin adat. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara sistem demokrasi formal dan sistem tradisional, sebuah pola tata kelola yang jarang ditemukan di desa lain.

Di sisi lain, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti kepemimpinan adat dalam konteks pelestarian budaya atau penyelesaian konflik (Henley & Davidson, 2007). Relasi fungsional antara kepemimpinan adat dengan tata kelola pemerintahan desa justru belum banyak mendapat perhatian akademik. Kajian mengenai praktik integrasi kepemimpinan adat dengan pemerintahan desa modern masih terbatas, padahal fenomena ini penting untuk dipahami sebagai model tata kelola yang kontekstual dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) bahwa belum banyak kajian yang menganalisis secara mendalam bagaimana kepemimpinan adat berperan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa, khususnya dengan pendekatan kolaboratif antara adat dan negara. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara empiris peran kepemimpinan adat dalam tata kelola pemerintahan Desa Tanjung, sekaligus membandingkannya dengan pola kepemimpinan adat di desa lain di Indonesia.

Dengan fokus tersebut, penelitian ini tidak hanya diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur tentang tata kelola desa berbasis kearifan lokal, tetapi juga kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan desa yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Riau. Subjek penelitian meliputi kepala adat dari empat suku, kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada berbagai kegiatan adat maupun pemerintahan desa, wawancara mendalam dengan kepala adat, kepala desa, dan tokoh agama, serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan (Miles & Huberman, 1994)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adat di Desa Tanjung masih memegang peranan yang sangat vital dalam tata kelola pemerintahan desa. Kepala adat dari empat suku, yaitu Bomo, Melayu, Piliang, dan Pitopang, bukan hanya berfungsi sebagai pemimpin simbolis, tetapi juga sebagai rujukan utama masyarakat dalam mengambil keputusan penting. Dalam praktiknya, keputusan yang diambil oleh kepala desa sering kali tidak dianggap final sebelum memperoleh legitimasi dari para kepala adat. Hal ini mencerminkan bahwa kepala adat berperan sebagai sumber

legitimasi sosial yang memperkuat otoritas formal kepala desa. Dengan demikian, kepemimpinan adat berfungsi sebagai penopang utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Dalam konteks penyelesaian konflik, mekanisme adat masih ditempatkan pada posisi pertama sebagai jalur utama penyelesaian masalah. Permasalahan sosial, perselisihan antarwarga, hingga sengketa lahan umumnya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah adat yang melibatkan kepala suku dan tokoh masyarakat. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur adat, barulah kasus tersebut dibawa ke pemerintah desa untuk dicarikan jalan keluarnya. Jika langkah ini juga tidak berhasil, maka proses penyelesaian dilanjutkan ke tingkat aparat hukum. Pola penyelesaian berlapis ini memperlihatkan adanya hirarki sosial yang menempatkan adat sebagai fondasi utama dalam menjaga harmoni dan ketertiban masyarakat, sekaligus menunjukkan efektivitas peran adat dalam mencegah konflik berkembang ke ranah hukum formal.



Gambar 1 Balai Pertemuan Desa Tanjung

Meskipun kepemimpinan adat memiliki pengaruh besar, Desa Tanjung tetap menegakkan prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Proses pemilihan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh warga desa dari keempat suku. Setiap suku memiliki hak yang sama untuk mencalonkan kandidat kepala desa, sehingga tercipta mekanisme demokratis yang inklusif. Kepala desa kemudian dipilih berdasarkan suara terbanyak, tanpa adanya dominasi dari salah satu suku tertentu. Praktik ini menggambarkan adanya integrasi antara sistem demokrasi modern dengan struktur adat tradisional, di mana adat berfungsi menjaga kesetaraan representasi, sementara demokrasi menjamin legitimasi politik berdasarkan kehendak mayoritas.

Sinergi antara adat dan pemerintahan desa terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Adat berfungsi memperkuat legitimasi kepala desa di mata masyarakat, sementara pemerintah desa menjalankan fungsi administratif dan pengelolaan pembangunan. Dengan adanya sinergi ini, stabilitas sosial dapat terjaga, karena masyarakat merasa bahwa keputusan-keputusan desa tidak hanya memiliki dasar hukum formal, tetapi juga didukung oleh nilai-nilai adat yang mereka junjung tinggi. Sinergi ini semakin kuat karena dalam praktiknya adat, agama, dan pemerintah dijalankan secara harmonis dalam bingkai falsafah lokal Tali Bapilin Tigo atau Tigo Tungku Sajorangan, yang menggambarkan keseimbangan antara adat, agama, dan negara.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan serius dalam tata kelola Desa Tanjung. Permasalahan administrasi desa, misalnya, sering kali menjadi hambatan dalam pelayanan masyarakat. Selain itu, keterbatasan pemberdayaan ekonomi masyarakat menyebabkan potensi lokal belum tergarap secara maksimal. UMKM yang ada, terutama produk makanan khas desa, hanya dipasarkan di lingkungan lokal tanpa adanya akses ke pasar yang lebih luas. Potensi wisata alam seperti Air Terjun Putri Khayangan dan Air Terjun Pinisan juga belum dikembangkan secara optimal akibat minimnya perhatian dari pemerintah dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Selain itu, ketergantungan masyarakat pada sektor perkebunan karet dan sawit membuat ekonomi desa menjadi rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya strategi tata kelola desa yang lebih inovatif dengan tetap berlandaskan pada kekuatan sosial adat.

Fenomena kepemimpinan adat di Desa Tanjung dapat dijelaskan melalui teori otoritas tradisional Max Weber (1947). Menurut Weber, otoritas tradisional memperoleh legitimasi dari norma sosial yang diwariskan dan diakui masyarakat. Dalam konteks Desa Tanjung, kepala adat memperoleh legitimasi dari warisan budaya dan struktur sosial tradisional, sementara kepala desa memperoleh legitimasi formal melalui mekanisme demokrasi. Keduanya saling melengkapi: otoritas tradisional memperkuat legitimasi otoritas legal-rasional, dan sebaliknya otoritas formal memberikan wadah administratif bagi otoritas adat. Integrasi ini menciptakan bentuk tata kelola hibrid yang memungkinkan Desa Tanjung menjaga stabilitas sosial sekaligus menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan modern.

Perbandingan dengan Desa Lain

Untuk memperkaya analisis, peran kepemimpinan adat di Desa Tanjung dibandingkan dengan dua desa adat lain di Indonesia, yaitu Desa Tenganan (Bali) dan Desa Nagari (Minangkabau, Sumatera Barat).

1. Desa Tenganan (Bali) Fenomena dominansi adat di Desa Tenganan juga diuraikan oleh (Suyadnya, 2021), yang menjelaskan bahwa struktur pemerintahan tradisional di desa tersebut tetap otonom meski terdapat regulasi pemerintah formal Bahkan, (Setiawan & Samosir, 2024) menyoroti eksistensi dinasti adat ("Native Tenganans") sebagai bentuk kontinuitas kepemimpinan tradisional. Selain itu, (Darmawan & Sancana, 2024)mengungkap adanya aturan adat tertulis (awig-awig) dan mekanisme konsultatif (sangkep) sebagai basis penegakan hukum dan keputusan kolektif di desa.
2. Desa Nagari (Minangkabau) Di sisi lain, dalam sistem Nagari Minangkabau, mengungkap bahwa nilai-nilai adat seperti ungkapan "adat tak lakang dek paneh, tak luntur dek hujan" tetap menjadi landasan identitas pemerintahan Nagari meskipun pernah terjadi seragam desa pada masa Orde Baru. (Adnan et al., 2021) menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai adat lokal seperti Tigo Tungku Sajarangan telah berkontribusi pada tata kelola pemerintahan Nagari yang inklusif dan berorientasi good governance. Namun demikian, transformasi kelembagaan pemerintahan Nagari juga menciptakan dualisme antara otoritas adat dan negara, seperti ditemukan di Pariangan oleh (Hidayat et al., 2017) hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas dalam struktur pemerintahan lokal Minangkabau.
3. Desa Tanjung (Riau) berada pada posisi yang lebih hibrid dibanding dua desa sebelumnya. Adat, agama, dan pemerintah dijalankan secara sinergis, di mana adat memperkuat legitimasi sosial, agama memperkuat nilai moral, dan pemerintah desa menjalankan fungsi administratif. Sistem ini memungkinkan Desa Tanjung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjaga harmoni sosial sekaligus menjalankan pemerintahan formal. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya pembangunan ekonomi, keterbatasan pengelolaan potensi wisata, dan masalah administrasi desa.

Perbandingan ini menunjukkan adanya variasi pola kepemimpinan adat di Indonesia. Desa Tenganan lebih didominasi oleh adat, Desa Nagari menekankan integrasi adat dengan agama, sedangkan Desa Tanjung memperlihatkan model hibrid yang relatif seimbang antara adat, agama, dan pemerintah. Model Desa Tanjung berpotensi menjadi contoh tata kelola yang adaptif, meskipun tetap memerlukan strategi pembangunan ekonomi yang lebih inovatif agar mampu mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Kepemimpinan adat di Desa Tanjung berperan penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Kepala adat berfungsi sebagai mediator, pengambil keputusan, dan penguat legitimasi sosial pemerintah desa. Sinergi adat, agama, dan pemerintah dalam Tali Bapilin Tigo menjadi model tata kelola desa yang menjaga stabilitas sosial sekaligus mempertahankan demokrasi formal. Namun, keberlanjutan model ini memerlukan perhatian pada aspek administrasi, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan pariwisata. Perbandingan dengan desa adat lain memperlihatkan bahwa Desa Tanjung memiliki keunggulan dalam integrasi adat dan demokrasi, tetapi perlu memperkuat kapasitas tata kelola modern agar tidak tertinggal dalam pembangunan.

REFERENSI

Adnan, M. F., Syamsir, S., Alhadi, Z., Malau, H., Widesma, A. V., & Maani, K. D. (2021). Integration of Local Wisdom Values in Realizing Good Nagari Governance. *Jurnal Ilmu Sosial*, *21*(1), 39–56. https://doi.org/10.14710/jis.21.1.2022.39-56

Darmawan, N. A. S., & Sancana, I. W. W. (2024). Portrait of the Management of Tenganan Pegeringsingan Traditional Village. *Community Services: Sustainability Development*, *1*(2), 56–62. https://doi.org/10.61857/cssdev.v1i2.79

Henley, D., & Davidson, J. S. (2007). The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism. *Modern Asian Studies*, *42*(4), 815–852.

Hidayat, Y., Febriyanto, I. I., & Nadzir, M. H. (2017). Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *2*(2), 227. https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9021

Latip, Ramli, Z., & Musa, M. F. (2023). Model Tadbir Urus Kampung di Kepenghuluan Rantau Bais Rokan Hilir Provinsi Riau Indonesia. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, *7*(December), 1–12.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (Second Edi). SAGE Publications, Inc.

Putra, A., Mashuri, Arifin, J., Yasir, M., & Masyhuri. (2020). *Strategi Kampar Menuju Serambi MAkkah Melalui "Tali Bapilin Tigo."*

Setiawan, I. K. O., & Samosir, T. (2024). Study Of The Political Dynasty "Native Tenganans" In The Government Of Tenganan Pegringsingan Traditional Village Bali. *Jurnal Hukum Sehasen*, *10*(1), 47–56. https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5731

Subagyo, A., Setiawan, A., Rohayatin, T., Nurdin, I., Septiansyah, B., & Ristala, H. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Bandung Dan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, *2*(1), 65–77. https://doi.org/10.26874/jakw.v2i1.105

Suyadnya, I. W. (2021). The Power Interactions between Adat and the State in the Perspective of Old-Balinese Village of Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Kajian Bali*, *11*(2), 517–538. https://doi.org/10.24843/JKB.2021.v11.i02.p15